

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan lebih dari sekedar masalah ekonomi, namun merupakan permasalahan sosial, budaya dan politik serta merupakan permasalahan yang mempunyai banyak segi. Karena kemiskinan bervariasi, diperlukan solusi sejak awal. Baik pemerintah maupun daerah telah melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan. (UJDIH BPK Perwakilan DIY, 2023). Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Sosial Indonesia (Permensos) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

Permensos yang disertai dengan bantuan sosial ini adalah bantuan dalam bentuk uang, barang, atau hadiah yang diberikan kepada individu, kelompok, atau golongan yang miskin atau tidak tanggap terhadap penderitaan masyarakat umum. Keterlibatan pemerintah daerah dalam memerangi dampak Covid – 19, khususnya dalam memerangi keadaan darurat yang timbul akibat pandemi covid, termasuk dalam memerangi masalah kemiskinan yang semakin meningkat.

Salah satu kajian yang dilakukan adalah mengkaji penggunaan dana desa. Pendapatan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan disalurkan melalui pajak dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang di dasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 5 ayat 2, disebutkan bahwa setiap dana desa bersifat unik dan disesuaikan dengan kondisi desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan salah satu inisiatif yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan terkait COVID – 19 yang ada di daerah tersebut.

COVID – 19 telah memberikan dampak signifikan terhadap banyak aspek kehidupan, termasuk perekonomian global. Salah satu proses industri

terbesar sedang mengalami kesulitan. Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) terdiri dari Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sosial Sembako (BSS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD), Kartu Prakerja, Kartu Sembako, dan Subsidi Listrik, yang merupakan intervensi pemerintah yang bertujuan untuk memitigasi dampak COVID – 19 terhadap kemiskinan dan sosial ekonomi masyarakat.

Karena penyaluran bansos merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, maka penyaluran bantuan juga merupakan pelayanan publik yang dilakukan oleh pelayan masyarakat yang berkehendak untuk menjamin terlindungnya bantuan tersebut. Pelayanan publik merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan. (Dwiyanto, 2021). Suatu pemerintahan dapat dikatakan baik apabila akuntabilitas pelayanan publik yang diberikan masyarakat juga baik. Disisi lain, pemerintah akan terus dikritik jika pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat kurang memadai. Institusi negara menyediakan kesehatan, pendidikan, administrasi dan lain – lain bagi warga negara.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat miskin di kabupaten yang bersumber dari Dana Desa guna mengurangi dampak pandemi COVID – 19. Program ini hadir sebagai respon terhadap tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial yang masih menjadi permasalahan di berbagai daerah termasuk di Indonesia. Dampak sosial ekonomi pandemi COVID – 19 berdampak signifikan terhadap kenaikan angka kemiskinan pada masyarakat umum. Hal ini disebabkan oleh menurunnya aktivitas ekonomi di tingkat makro, yang memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan serta jumlah orang miskin bertambah. Semua kebijakan dan program pemerintah mempunyai rekam jejak keberhasilan dan implementasi yang terbukti. Keberhasilan penerapan BLT ditentukan oleh pengelolaan, waktu dan efektivitas BLT yang baik sebagai program pengentasan kemiskinan.

Untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, anggaran minimum Dana Desa yang ditetapkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT – DD) mengalami perubahan. Pada tahun 2020, tidak ada persentase minimum khusus yang ditetapkan untuk BLT – DD, tetapi banyak desa mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, pemerintah menetapkan paling sedikit 40% tanah di kabupaten/kota harus dimanfaatkan untuk program jaminan sosial, seperti BLT – DD. Pada tahun 2022, persentase minimal penyaluran BLT – DD tetap sebesar 40% dari total alokasi dana desa, sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Pada tahun 2023, persentase BLT – DD minimal 10% dan maksimal 25% dari seluruh wilayah kabupaten. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa memuat informasi tersebut. Kemudian, pada tahun 2024 disebutkan bahwa akan ada pengurangan minimal 20% dari luas Anggaran Dana Desa untuk bantuan tunai jangka panjang.

Berdasarkan data BLT – DD nasional tahun 2020, rata – rata dana desa untuk 74.953 desa di seluruh Indonesia adalah Rp71,19 triliun. Salah satu anggaran tersebut telah dialokasikan untuk BLT – DD guna membantu masyarakat desa yang tengah dilanda pandemi. COVID – 19. Data Penyaluran BLT – DD di Provinsi Jawa Barat Informasi spesifik mengenai penyaluran BLT – DD di Provinsi Jawa Barat tidak tersedia pada sumber yang ada. Namun secara umum, setiap desa di provinsi tersebut mendapat alokasi dana desa yang sebagian digunakan untuk BLT – DD sesuai kebutuhan dan kondisi masing – masing desa. Pendataan BLT – DD di Desa Waringin Jaya telah selesai dan telah terkirim ke warganya. Masyarakat Desa Waringin Jaya dapat memanfaatkannya dari masing – masing RW minimal enam KK. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa dan dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir pukul 11.00 WIB. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapat subsidi bulanan sebesar Rp300.000. Berikut pendataan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) di Desa Waringin Jaya :

Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	Jumlah Tanggungan/ anak
Talita Ayu Nurhaliza	Laki - Laki	44	IRT	2
Yulia	Perempuan	47	pedagang	1
Fadhila eka Sari	Perempuan	35	ibu rumah tangga	3
Selvi	Perempuan	25	Masyarakat BLT	1
Rahayu Amira Dewi	Perempuan	38	ibu rumah tangga	3
nur cahyati	Perempuan	50	ibu rumah tangga	4
Annisa Novitri	Perempuan	54	Ibu rumah tangga	2
Magdalena Simbolon	Perempuan	39	ibu rumah tangga	4
supriyati	Perempuan	50	ibu rumah tangga	2
rania	Perempuan	35	admin	2
Suryati	Perempuan	37	karyawan swasta	5
Amalina	Perempuan	37	Karyawan Swasta	2
Asha	Perempuan	45	Pegawai	4
Dithania Rahmahtika	Perempuan	46	Guru	3
Sarah	Perempuan	21	ibu rumah tangga	4
dastam	Laki - Laki	48	pengemudi ojek online	3
Anggraini	Perempuan	41	IRT	3
fauziah	Perempuan	48	ibu rumah tangga	2
Suci Mulyati	Perempuan	65	Ibu Rumah Tangga	1
sumiyati	Perempuan	60	ibu rumah tangga	3
kartika isriani	Perempuan	38	ibu rumah tangga	2
Agustinus	Laki - Laki	50	Pegawai swasta	1
juniarji	Laki - Laki	45	karyawan swasta	4
Naula	Perempuan	22	Agen intelijen negara	1
Tati	Perempuan	47	IRT	1
Alex Bramantyo	Laki - Laki	28	pegawai swasta	1
muhammad ichsan fatahilah	Laki - Laki	21	operator produksi	3
Dewi Sari	Perempuan	19	ibu rumah tangga	3
Naveeny	Perempuan	45	Karyawan Swasta	1
Syakira	Perempuan	34	Ibu Rumah Tangga	2
Candra Ramadhan	Laki - Laki	20	waiters	3
Dinda Safira	Perempuan	30	Pegawai swasta	3
Endang Arina	Perempuan	33	Ibu Rumah Tangga	2

Ammar	Laki - Laki	38	Wiraswasta	3
Hawa Shofurani	Perempuan	35	Wirausaha	2
Muhamad Ilham Alwaisyi	Laki - Laki	20	Pegawai Swasta	2
asep cahyadi	Laki - Laki	47	kuli bangunan	4
Zainal	Laki - Laki	40	driver ojol	5
Najwa Salsabila	Perempuan	27	Pramugari	0
susi sulyani	Perempuan	49	Karyawati	2
Sri Rismayanti	Perempuan	39	Karyawan swasta	1
dedi mulyono	Laki - Laki	40	tidak bekerja	3
Mariam iza	Perempuan	32	Ibu rumah tangga	2
Irna Deviana	Perempuan	36	pegawai swasta	2
haura jasmine	Perempuan	45	ibu rumah tangga	2
Tini Suhartini	Perempuan	50	Ibu Rumah Tangga	5
Siti Saekhu Fransiska	Perempuan	30	Karyawan swasta	2
naura calista	Perempuan	43	ibu rumah tangga	2
fatimah nur jannah	Perempuan	51	ibu rumah tangga	4
Johan pranata	Laki - Laki	56	proyek	3
riski romadhon	Laki - Laki	45	kuli	3
pranata	Laki - Laki	55	cleaning service	5
Tika	Perempuan	28	Karyawan Swasta	2
Muhammad azzam	Laki - Laki	43	kuli	3
pratama deko	Perempuan	46	pedagang	3
hikmatul hawa	Perempuan	45	ibu rumah tangga	3
Riyatmi	Perempuan	49	Swasta	1
Sena	Perempuan	40	Karyawan	4
Resti Afrilla	Perempuan	20	Mahasiswa	-
Nurhadi	Laki - Laki	39	Bisnis Hp Second	3
Gilas Prakoso	Laki - Laki	22	Freelance	0
Rifa Aprilia	Perempuan	20	Mahasiswa	4
Arya	Laki - Laki	23	Mahasiswa	-
ai Siti basmalah	Laki - Laki	39	ibu rumah tangga	3
jamaludin	Laki - Laki	45	tidak bekerja	3
Siti Muthmainah	Perempuan	48	ibu rumah tangga	2
Siti utami	Perempuan	44	wirausaha	2
Andira	Perempuan	21	Karyawan Swasta	0
Nur Laila Dwi Santoso	Perempuan	20	mahasiswi	-
aldrian rasya	Laki - Laki	20	mahasiswa	0

syahrul roji	Laki - Laki	38	ojek online	4
mulyana asih	Perempuan	39	ibu rumah tangga	4
zahra	Perempuan	39	ibu rumah tangga	4
suryati	Perempuan	37	karyawan swasta	5
mulyati	Perempuan	38	pengusaha	3
zainal	Laki - Laki	40	driver ojol	5
suci sulyani	Perempuan	49	karyawan swasta	3
sriyani	Perempuan	45	irt	4
tini suhartini	Perempuan	50	IRT	5
hariyanto	Laki - Laki	50	tidak bekerja	4
ari setyoko	Laki - Laki	50	driver ojol	2
nu'man zen	Laki - Laki	40	pengusaha	5
rosidah nindya	Perempuan	40	pengusaha	4

Namun dalam pelaksanaannya, BLT – DD menghadapi beberapa permasalahan terkait akuntabilitas. Akuntabilitas dalam konteks penyaluran BLT – DD mencakup aspek transparansi, tanggung jawab, dan efisiensi dalam memastikan bantuan benar – benar sampai kepada penerima yang tepat. Sayangnya, berbagai kasus buruknya tata kelola penyaluran BLT – DD menunjukkan prinsip akuntabilitas kerap kali diabaikan. Data penerima tidak benar atau keliru, banyak ditemukan kasus penyaluran bantuan kepada masyarakat yang tidak sesuai kriteria penerima manfaat. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan dalam pengumpulan data atau manipulasi data oleh pihak tertentu.

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan BLT – DD karena proses penentuan penerima seringkali tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara terbuka, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya penyimpangan dalam pengalokasian dana. Kurangnya pengawasan dan pemantauan. Pemantauan terhadap penyaluran BLT – DD seringkali tidak efektif sehingga membuka celah terjadinya penyimpangan seperti pemotongan dana oleh orang pribadi atau pajak ilegal. Kurangnya akuntabilitas aparat desa dalam mengelola BLT – DD. Aparat desa sebagai pengelola anggaran sering kali tidak memberikan laporan yang transparan dan akurat terkait penggunaan dana, sehingga masyarakat kesulitan memperoleh informasi terkait pelaksanaannya.

Namun, kemampuan ini berpotensi mengurangi efektivitas program BLT – DD dalam mencapai tujuannya, yaitu membantu masyarakat miskin yang sangat membutuhkan. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan dan pengelolaan BLT – DD perlu diubah agar prinsip akuntabilitas dapat diterapkan secara efektif. Dengan meningkatkan akuntabilitas, penyaluran BLT – DD dapat lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel sehingga manfaat yang diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat desa yang membutuhkan.

Namun dalam pelaksanaannya, banyak ditemukan permasalahan akibat buruknya pengelolaan yang buruk dalam penyaluran BLT dapat menimbulkan banyak negatif, termasuk kurangnya akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam mencapai pengelolaan pemerintahan yang efektif dan mengharuskan pemerintah untuk berkomitmen penuh terhadap tindakan dan keputusan yang dibahas. Kurangnya tanggungjawab dalam penyaluran BLT dapat menimbulkan banyak permasalahan seperti berikut :

- a Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, masyarakat yang merasa dirugikan oleh maladministrasi BLT dapat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.
- b Penyalahgunaan dana BLT, kurangnya transparansi dalam proses penyaluran BLT dapat membuka peluang penyalahgunaan dana oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
- c Inefektivitas program BLT, tata kelola yang buruk dapat membuat program BLT tidak efektif dalam mencapai tujuannya.

Dengan adanya penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran merupakan polemik yang akan terjadi dan muncul seketika jika pemerintah mendistribusikan bansos. Hal ini juga merupakan dampak dari program kesejahteraan sosial pemerintah yang bertujuan untuk meringankan dampak COVID – 19 yang seringkali menimbulkan penyimpangan di masyarakat. Sistem pendukung peraturan pemerintah, kurangnya pemerintah dan tidak

jasas. Dan dengan demikian hal ini mengakibatkan penyaluran bantuan langsung tunai dianggap buruk dalam menjangkau masyarakat.

Studi ini meneliti maladministrasi yaitu pengelolaan yang buruk dalam penyaluran BLT dapat menimbulkan ketidakadilan, termasuk kurangnya akuntabilitas. Namun dalam pelaksanaannya, banyak ditemukan kendala akibat buruknya pengelolaan penyaluran BLT, seperti pemberian informasi penerima yang tidak benar, penyaluran yang tidak tepat sasaran dan kurang transparannya proses penyaluran. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh penulis, maka penulis dapat menganalisis maladministrasi Bantuan Langsung Tunai yang terjadi di Desa Waringin Jaya Bojonggede yang bahkan mengalami maladministrasi dalam penyaluran BLT, maka judul yang kami angkat ialah **“Pengaruh Maladministrasi Penyaluran Bantuan Tunai Langsung (BLT) Terhadap Kurangnya Penerapan Akuntabilitas : Studi Kasus di Desa Waringin Jaya Bojonggede”**

1.2 Batasan Penelitian

Penelitian dibatasi di Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojonggede. Batasan lokasi ini diterapkan untuk memperoleh data yang mendalam dan spesifik terkait kondisi di desa. Berfokus pada penelitian dengan menemukan ruang lingkup penelitian akan memungkinkan dalam melakukan analisis lebih mendalam dan memuat temuan yang lebih spesifik. Kelayakan penelitian juga akan membuat penelitian lebih mudah dikelola dan diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.

Relevansi dengan menetapkan penelitian pada suatu desa, maka peneliti mendapatkan data dan konteks yang relevan. Menganalisis pengaruh pengelolaan alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) yang tidak tepat terhadap praktik akuntabilitas yang kurang baik di Desa Waringin Jaya Bojonggede. Studi maladministrasi mencakup keterlambatan dalam mendistribusikan kriteria yang ambigu bagi penerima penggelapan dan kekurangan sosial. Sementara akuntabilitas diukur berdasarkan ketersediaan laporan pertanggungjawaban, keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat dan adanya mekanisme pengawasan.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah apakah ada pengaruh antara maladministrasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap penerapan akuntabilitas?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan maladministrasi yang tidak tepat pada sasaran di Desa Waringin Jaya Bojonggede. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, secara praktis penelitian pada judul ini dapat menjadi indikasi bahan input terhadap Pemerintah Desa Waringin Jaya untuk meningkatkan indikator didalamnya. Sebagai bahan materi referensi kepada pengamat selanjutnya untuk mengkonsolidasikan pengamat dibidang administrasi pada pemerintahan, sebagai syarat dalam menuntaskan tugas akhir. Namun terdapat tujuan yang spesifik pada judul yang penulis angkat yaitu sebagai berikut :

- a Guna menganalisis penyalahgunaan pengelolaan penyaluran BLT terhadap kurangnya akuntabilitas di Desa Waringin Jaya Bojonggede.
- b Memahami pandangan masyarakat Waringin Jaya mengenai kesalahan pengelolaan penyaluran BLT dan kurangnya praktik akuntabilitas
- c Menyusun rekomendasi untuk mencegah kesalahan pengelolaan penyaluran BLT dan meningkatkan praktik akuntabilitas.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan kajian ini adalah untuk memberikan wawasan teoritis dan praktis mengenai peningkatan kualitas Program Jaminan Sosial Indonesia. Secara teoritis, artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para pembaca mengenai konsep tersebut, khususnya mengenai pentingnya akuntabilitas dan konsekuensi dari buruknya tata kelola. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dan saran kepada dosen, mahasiswa, penyelenggara Bantuan Sosial dan masyarakat sekitar tentang bagaimana mencegah maladministrasi Bantuan Tunai Langsung (BLT) terhadap pentingnya akuntabilitas, serta dengan manfaat lain

sebagai berikut :

- a Meningkatkan kesadaran akan berdampak pengelola penyaluran BLT yang tidak tepat terhadap kurangnya praktik akuntabilitas.
- b Memberikan masukan untuk perbaikan penerapan BLT di masa mendatang.
- c Meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dana masyarakat.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam proposal penelitian ini, penulis akan menguraikan lima bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pengamat akan membahas proposal penelitian dalam beberapa paragraf, seperti paragraf yang membahas latar belakang masalah, masalah perumusan, manfaat, tujuan, dan pendekatan sistematis penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

menyajikan karya sastra dan membahas teori-teori yang mendukung penelitian ini. Ini juga berfungsi sebagai referensi dari teori dan penelitian yang relevan untuk menjelaskan variabel yang akan diteliti.

Bab III Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian meliputi lokasi dan durasi penelitian, jenis dan jumlah data yang dikumpulkan, populasi dan sampel, teknik analisis, dan definisi operasional.

Bab IV Penyajian Dan Analisis Data

Pada bab ini menjelaskan tentang laporan uji coba instrumen, deskripsi data, uji persyaratan analisis data, uji korelasi, koefisien determinasi, analisis regresi, pengujian hipotesis, dan pengukuran hasil penelitian.

Bab V Kesimpulan

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan, memaksakan penelitian dan saran.